

BAB V

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Bentuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan beberapa proses tahapan yaitu proses penyediaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran, dan proses pertanggungjawaban anggaran. Setiap pelaksanaan anggaran dilakukan pengawasan dan pengujian untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah membutuhkan pengawasan dengan melakukan pengujian terhadap bukti dokumen-dokumen pengeluaran keuangan dengan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan disebut juga dengan verifikasi. Dalam pelaksanaan anggaran sebelum dilakukannya pembayaran akan dilakukan pemeriksaan terhadap bukti dokumen pengeluaran anggaran yang diajukan oleh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah dengan menugaskan pejabat yang berwenang dalam pengujian pemeriksaan dokumen pengeluaran.

Dalam memverifikasi pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara manual yang bertujuan untuk dapat meneliti kelengkapan dan keabsahan dari bukti dokumen pengeluaran keuangan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan verifikasi tersebut. Tahapan verifikasi dilakukan sampai tahapan pencairan dana yang akan dibayarkan langsung kepada bendahara pengeluaran/pihak ketiga sebagai penerima dari pencairan dana.

Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan aturan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan penerapan pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran.

1.2. SARAN

Pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar sangatlah penting untuk dilakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terkait dokumen-dokumen keuangan. Selama pelaksanaan satu tahun anggaran, hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dari tahap awal yaitu perencanaan sampai dengan tahap akhir dengan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak menunda pekerjaan yang mengakibatkan penumpukan yang pada akhirnya pembuatan laporan kegiatan terlupakan.

Pemerintahan Daerah perlu mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti mengadakan penyuluhan pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban anggaran agar dapat melaksanakan pengawasan anggaran daerah sehingga dapat menciptakan kualitas yang lebih baik dan terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan. Serta pengarahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan anggaran terhadap pengujian dokumen keuangan maka dibutuhkan pengarahan yang tegas agar kesalahan dalam pengujian tidak terjadi untuk menghindari kecurigaan dari pemverifikasian laporan.

Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pengawasan dalam proses penyediaan, proses pengadaan, proses pembayaran dan pertanggung jawaban terhadap anggaran. Maka pelaksanaan mekanisme verifikasi

pertanggung jawaban anggaran harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

